

BAB IV

POTRET KOTA JAYAPURA

Visi Kota Jayapura sebagai “Masyarakat Kota Jayapura Yang Beriman, Maju, Mandiri dan Sejahtera” dapat terimplementasi dengan baik untuk kemajuan Kota Jayapura itu sendiri. Merawat khbinekaan dan hubungan-hubungan sosial-keagamaan di Kota Jayapura bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Kota Jayapura yang dihuni oleh banyak kelompok (etnis dan agama) meruapakn potensi yang harus dimanfaatkan untuk membangun Jayapura. Untuk itu, diperlukan kehendak bersama dari semua elemen masyarakat di Kota Jayapura, seperti pemerintah dan tokoh-tokoh agama dan kemasyarakatan untuk terlibat aktif menjalim kerjasama untuk kepentingan bersama. Berikut ini peneliti menguraikan mengenai kondisi geografis, demografis, ekonomi, dan sosial di Kota Jayapura.

4.1 Letak Geografis

Nama Kota Jayapura pada awalnya adalah Hollandia, dimana nama tersebut diberi oleh Kapten Sachse pada tanggal 07 Maret 1910. kata Hollandia terdiri dari 2 pecahan suku kata, Hol = lengkung; teluk, land = tanah; tempat. Jadi Hollandia artinya tanah yang melengkung atau tanah/tempat yang berteluk. Negeri Belanda atau Holland atau Nederland-geografinya menunjukkan keadaan berteluk teluk. Geografi Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara Negeri Belanda itu. Kondisi alam yang lekuk - lekuk inilah yang mengilhami Kapten Sachse untuk mencetuskan nama Hollandia di atas nama asli Numbay. Numbay diganti nama sampai 4 kali Hollandia - Kotabaru -

Sukarnopura - Jayapura, yang sekarang dipakai adalah "JAYAPURA".

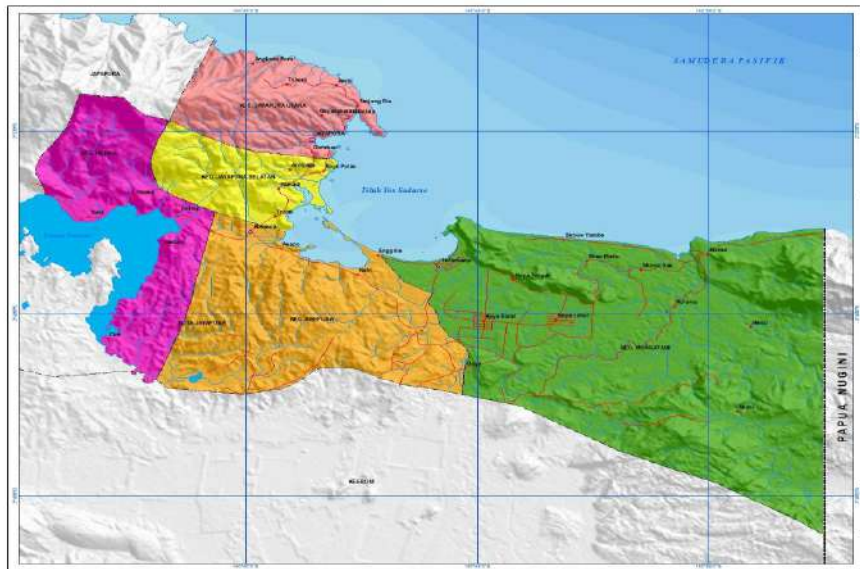
Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura berdiri sejak tanggal 21 September 1993 berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 1993 dengan luas wilayah 94.000 Ha. Dari luas wilayah tersebut, terdapat $\pm 30\%$ tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa dan hutan yang dilindungi dengan kemiringan tanah 40% yang bersifat konservasi dan hutan lindung. Kota ini terdiri dari 5 Distrik yaitu Abepura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, Muara Tami dan Heram. Kota Jayapura sendiri terbagi dalam 24 Kelurahan dan 15 Kampung.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Distrik di Kota Jayapura, 2016

Distrik	Luas (km²)	Persentase (%)
1. Abepura	155.7	16.56
2. Jayapura Selatan	43.4	4.62
3. Jayapura Utara	51	5.43
4. Muara Tami	626.7	66.67
5. Heram	63.2	6.72
Jumlah	940	100

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2017.

Wilayah Kota Jayapura mempunyai batas administratif di sebelah Utara berbatasan dengan Lautan Pasifik. Di sebelah Selatan kota Jayapura berbatasan dengan Distrik Arso Kab. Keerom. Sedangkan di sebelah Timur kota Jayapura berbatasan dengan Negara PNG. Adapun di sebelah Barat, wilayah Kota Jayapura berbatasan dengan Distrik Sentani dan Depapre Jayapura.



Gambar 4.1 Peta Kota Jayapura

Sumber: www.papua.co.id, 2017.

Kota Jayapura, dengan statusnya sebagai ibukota Provinsi Papua, memiliki posisi strategis baik dari segi geografis maupun geopolitik. Dari aspek geografis, menjadi bagian wilayah Papua yang mudah dijangkau dari berbagai kawasan nusantara maupun mancanegara. Letak wilayah berada pada bagian Utara Papua yang berhadapan langsung dengan lautan Pasifik serta berbatasan langsung dengan Papua New Guine, merupakan

faktor penting yang berpeluang dapat dioptimalkan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa. Hal ini ditandai dengan meningkatnya mobilitas penduduk, barang dan jasa dari berbagai kawasan ke Kota Jayapura, dan sebaliknya, yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Dari segi geopolitik, di mana posisi Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua, menjadi barometer penetapan arah kebijakan pembangunan yang berimplikasi pada tata ruang wilayah dengan menempatkan Kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan. Hal tersebut, menjadi modal dasar yang mengilhami pemanfaatan status dan posisi strategisnya dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan di Kota Jayapura, baik Jangka Panjang maupun Jangka Pendek (RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016: 86).

Letak geografis yang strategis ini sejatinya menjadi modal yang sangat memadai di dalam konteks pengembangan kota Jayapura sebagai ibukota Propinsi Papua, khususnya dalam rangka memacu peningkatan pembangunan di wilayah ini. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan potensi pariwisata yang sangat memadai,¹ sejatinya menjadikan papua melebihi wilayah-wilayah lain di Indonesia.

¹Keindahan alam dan kekayaan sumber daya alam Propinsi Papua merupakan modal besar untuk membangun sektor-sektor strategis untuk kemajuan orang Papua, khususnya di Kota Jayapura. Kiranya tidak mengherankan jika Papua dianggap sebagai salah satu penyumbang dana untuk pembangunan di negeri ini. Itu karena alam dan kekayaannya. Edo Kondologit, penyanyi kelahiran Papua, menyebut Papua sebagai “sekeping surga yang jatuh ke bumi”.

4.2 Kondisi Demografi

Penduduk Papua tahun 1961 (± 758.000 jiwa), 1971 (± 923.000 jiwa), 1980 ($\pm 1.174.000$ jiwa), 1985 ($\pm 1.371.000$ jiwa), 1990 ($\pm 1.629.000$ jiwa), dan 2000 ($\pm 2.563.000$ jiwa) (BPS, 2008), mendiami wilayah ± 3 kali Pulau Jawa sehingga penduduknya sedikit dibanding Kabupaten/Kota Bogor (3.508.826 jiwa), Bandung (4.158.083 jiwa), atau Malang (2.412.570 jiwa) (BPS, 2000). Sensus Penduduk (SP, 1971, 1980, 1990, 2000) menunjukkan pertumbuhan penduduk dominan karena migrasi (*immigration*) dari provinsi lainnya dibanding penambahan alami (*natural increase*), serta telah merubah komposisi penduduk, struktur penduduk, dan memunculkan konflik sosial (La Pona, 2008: 51).

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 penduduk Kota Jayapura berjumlah menjadi 256,705 jiwa. Laju pertumbuhan selama 5 tahun terakhir sebesar 2,44% per tahun, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 yaitu 10.71%. Bila dihitung selama 10 tahun terakhir, ditemukan angka yang lebih tinggi, yakni 4,16%. Pertumbuhan penduduk tertinggi di Distrik Muara Tami, yakni 5,1% dan terendah di Distrik Heram, yakni 3.72 %. Sedangkan data yang diperoleh dari BPS pada tahun 2017 menunjukkan adanya penambahan penduduk yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kota Jayapura sebanyak 288.786 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Distrik Abepura dengan jumlah 82.090 jiwa, dan daerah dengan penduduk terkecil adalah Distrik Muara Tami dengan jumlah penduduk sebanyak 12.626 jiwa (BPS, 2017: 59). Data ini juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Jayapura mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun akibat berbagai faktor termasuk arus masuk orang yang berasal dari luar Jayapura.

Tingginya laju pertumbuhan itu lebih disebabkan oleh meningkatnya arus migrasi masuk. Adapun tingkat kepadatan penduduk Kota Jayapura pada tahun 2010 adalah 278 jiwa per km², dengan tingkat kepadatan terendah di Distrik Muara Tami, yaitu 18 jiwa per km², sedangkan tingkat kepadatan tertinggi di Distrik Jayapura Selatan, yaitu 1,542 jiwa per km². Menurut data hasil sensus tahun 2010, sex ratio penduduk Kota Jayapura sebesar 114, yang berarti bahwa penduduk laki-laki 14 % lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Adapun rata-rata banyaknya rumah tangga yang menempati satu rumah tangga (2010) adalah 4 orang.

Secara khusus, di kota Jayapura, peningkatan penduduk selama beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk hingga tahun 2014 adalah 119. 383 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Jayapura memungkinkan terjadi karena arus migrasi yang cukup besar dari orang-orang di luar papua. Memang, Papua sejak lama memang menjadi daerah tujuan migran dan transmigrasi di Indonesia walaupun situasi sosial, politik, ideologi, dan keamanan tidak selalu stabil. Bagi negara, program transmigrasi memiliki tujuan-tujuan penting. Bagi migran spontan pertimbangan ekonomi menjadi faktor utama ke daerah ini. Migran spontan dominan berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Maluku, sedangkan transmigran terbanyak berasal dari Pulau Jawa.

Pertumbuhan penduduk karena migran dianggap telah membuat orang asli sulit memperbaiki kehidupan, memiskinkan, memarjinalkan, memunculkan situasi konflik, dan pandangan negatif lainnya, sedangkan transmigrasi dihentikan karena dinilai

sekelompok masyarakat asli sebagai penyebab penderitaan orang asli, pengambilan lahan-lahan subur orang asli, penghilangan sumber kehidupan orang asli (berburu dan perambahan), rusaknya nilai sosial budaya orang asli, program islamisasi, Jawanisasi, kolonisasi, aneksasi, dan lainnya (La Pona, 2008: 52). Pandangan-pandangan tendensius ini tentunya dengan berbagai alasan, motif, dan tujuan tertentu pula, serta telah memunculkan perasaan kurang senang, kurang bersahabat, sikap penolakan dan suasana konflik tertutup antara sekelompok orang asli dengan migran dan transmigran. Padahal, sejak masuk kepangkuan Ibu Pertiwi sesungguhnya migran dan transmigran telah sangat banyak memberikan kontribusi positif, penting, dan strategis bagi kehidupan masyarakat Papua serta pembangunan daerah dan nasional di tanah Papua.

Kelompok (asli) di Papua terdiri atas 250 suku dengan bahasa yang berbeda (Suwae, 2013).² Seni tradisional yang indah dan telah terkenal di dunia dibuat oleh suku Asmat, Kamoro, Dani, dan Sentani. Sumber berbagai kearifan lokal untuk kemanusiaan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik di antaranya dapat ditemukan di suku Aitinyo, Arfak, Asmat, Agast, Aya maru, Mandacan, Biak, Arni, Sentani, dan lain-lain.

² Kondisi ini juga memperlihatkan salah satu kompleksitas yang ada di Papua. Dengan jumlah suku yang sedemikian banyak, sangat sulit menentukan salah satu suku yang dianggap ‘paling layak’ atau merepresntasikan Papua. Tipologi yang digunakan hingga saat ini adalah tipologi yang menunjukkan geografis, yaitu daerah pegunungan dan daerah pantai. Pengelompokan inilah yang menghiasi dinamika (politik) Papua saat ini, khususnya terkait dengan daerah-daerah yang memiliki wilayah yang mencakup pegunungan dan pantai. Akan tetapi, bagi beberapa daerah (kabupaten) yang tidak memiliki wilayah pantai, tipologi ini tidak relevan.

Umumnya masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan dengan menganut garis keturunan ayah (patrilinea). Budaya setempat berasal dari Melanesia. Masyarakat berpenduduk asli Papua cenderung menggunakan bahasa daerah yang sangat dipengaruhi oleh alam laut, hutan, dan pegunungan.

Dalam perilaku sosial terdapat suatu falsafah masyarakat yang sangat unik, seperti yang ditunjukkan oleh budaya suku Komoro di Kabupaten Mimika, yang membuat genderang dengan menggunakan darah. Suku Dani di Kabupaten Jayawijaya yang gemar melakukan perang-perangan, yang dalam bahasa Dani disebut Win. Budaya ini merupakan warisan turun-temurun dan dijadikan festival budaya lembah Baliem. Di Lembah Baliem ini, memiliki satu keunikan di mana masyarakatnya banyak yang memeluk Islam. Mereka mempraktikkan dan mengenal Islam sudah lama, meskipun masih dipraktikkan bersamaan dengan adat yang diwarisi hingga sekarang ini.

Proses migrasi mengakibatkan perubahan komposisi penduduk migran dan penduduk asli Papua. Populasi migran dan orang asli mulai berimbang dan apabila arus migrasi masuk terus berlangsung maka jumlah migran akan lebih dominan. Di perkotaan, migran sudah lebih banyak dibanding orang asli. Migran memiliki sumber daya manusia dan sosial ekonomi lebih baik, sedangkan masyarakat kampung sebagian besar orang asli yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan, mereka terpinggirkan secara ekonomi dan memilih berdiam di pinggiran kota dekat pantai/laut. Mereka pun berprofesi hanya sebagai pedagang kecil yang setiap hari melakukan aktivitas perdagangan dengan menjual buah pinang dan aneka sayuran yang diperoleh dari kebunnya.

Pertumbuhan penduduk membentuk struktur penduduk spesifik serta menjadi perhatian, keprihatinan, kekhawatiran, dan ketidaksenangan kalangan tertentu masyarakat asli, serta menjadi salah satu isu sosial-politik. Struktur penduduk berkaitan dengan struktur sosial, lapisan sosial, interaksi sosial, dan jaringan sosial masyarakat, serta perlu dipahami dan dicermati karena pada taraf tertentu menimbulkan ketegangan sosial dan daya tampung sosial melemah. Migran telah menguasai sumber-sumber ekonomi masyarakat asli serta telah menimbulkan kesulitan hidup, rasa tidak suka, ketidak-senangan, dan kecemburuan sosial masyarakat asli terhadap migran. Sikap sosial ini mulai pula ditujukan pada orang asli yang tinggal dan sukses di daerah orang asli lainnya, walaupun tidak sampai pada pengusiran secara fisik terhadap migran karena mungkin tidak berani, takut terhadap pihak keamanan, atau karena kearifan budaya masyarakat. Menariknya, wacana penolakan migran karena alasan ekonomi tertuju pada migran Buton, Bugis, Makassar (BBM), dan Jawa, bukan pada WNI keturunan Cina yang menguasai ekonomi di Papua.

Di satu sisi, keragaman penduduk dari sisi etnis dapat menjadi modal di dalam menjaga praktik multikulturalisme berkembang dengan baik di Kota Jayapura dan menjadi modal sosial yang sangat memadai dalam konteks peningkatan pembangunan. Namun di sisi lain, keragaman etnis/penduduk sebagai hasil migrasi besar-besaran penduduk dari luar Kota Jayapura dapat memicu kerawanan sosial dan dapat meretakkan sendi-sendi kehidupan sosial di Kota Jayapura. Hal ini misalnya dapat dilihat pada sentimen kepada pendatang, khususnya pendatang Muslim dalam beberapa tahun ini. Pendatang, memang pada realitasnya merupakan Muslim. Realitas ini tidak bisa dinafikan pengaruhnya atas menghambatnya hubungan

antara Muslim dan Kristen di Papua, khususnya di Kota Jayapura.

Di berbagai tempat di Indonesia, ada kecenderungan masyarakat setempat (asli) untuk lebih memilih menjadi PNS ketimbang bekerja di sektor swasta. Bahkan, ada anggapan yang mengatakan bahwa masyarakat di negeri (Papua, bahkan Indonesia) ini sangat dimanjakan oleh alam, sementara masyarakat pendatang berjuang hidup dengan menaklukkan alam dan lingkungan dimana mereka berada. Kegigihan inilah, menurut peneliti, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi terjadi antara pendatang dan penduduk asli di Papua. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada pola hubungan sosial yang sering diiringi oleh ketegangan, tetapi juga meluas pada hubungan keagamaan yang sering ‘memanas’.

4.3 Kondisi Ekonomi dan Distribusi Pekerjaan

Kondisi perekonomian masyarakat Jayapura didominasi oleh kesibukan di bidang perdagangan dan jasa. Masyarakat umumnya menggeluti bidang tersebut. Akan tetapi, di sisi lain dapat dilihat bahwa kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kampung transmigran sedikit lebih baik. Perubahan komposisi penduduk ini ditanggapi beragam dalam kehidupan masyarakat asli seperti mendukung dan menolaknya melalui berbagai argumen. Terpusatnya pembangunan di perkotaan menyebabkan mengalirnya arus migran orang asli dari kampung pedalaman Papua ke kota-kota daerah pantai serta mengubah komposisi penduduk orang pedalaman di daerah pantai. Orang asli Papua memang paling banyak berada di daerah pedalaman. Migran asal pedalaman ini cenderung mewarnai beberapa demonstrasi politik jalanan serta membuat kekhawatiran, ketakutan, dan kekurangnyamanan hidup masyarakat karena berpotensi rusuh.

Secara ekonomi, kontribusi Kota Jayapura dalam perekonomian Provinsi Papua adalah paling besar. Pada tahun 2009, pendapatan per kapita Kota Jayapura sebesar Rp 10,74 juta per kapita. Sedangkan Provinsi Papua diperkirakan sebesar Rp 5,28 juta per kapita untuk tahun yang sama. Dibandingkan dengan pendapatan per kapita di tingkat Provinsi, maka Pendapatan perkapita Kota Jayapura tampak lebih tinggi. Meskipun ukuran pendapatan per kapita saat ini masih diperdebatkan dalam menghitung tingkat kesejahteraan suatu wilayah, namun paling tidak dari indikator ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan wilayah di Kota Jayapura masih lebih tinggi dibandingkan tingkat Provinsi Papua secara menyeluruh. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa produktifitas ekonomi wilayah di Kota Jayapura jauh lebih baik dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Papua (BPS, 2011).

Selama ini sektor tersier menjadi pondasi perekonomian wilayah Kota Jayapura. Kontribusinya dalam menciptakan PDRB hingga tahun 2009 adalah sebesar 42.67% berada jauh di atas sektor sekunder sebesar 18.05%, dan sektor primer sebesar 7.78 %. Kota Jayapura dari tahun 2005–2008 didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor bangunan. Peranan keempat sektor tersebut sangat diandalkan dalam pembentukan PDRB Kota Jayapura. Bila dilihat peranan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor listrik dan air minum serta jasa-jasa terlihat mengalami penurunan sejak tahun 2005 hingga 2008.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tampak adanya perkembangan perekonomian Kota Jayapura yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB. PDRB pada tahun 2009, menjadi

5.62 triliun rupiah lebih yang mengalami rata-rata perkembangan selama 5 tahun sebesar 596.44 milyar rupiah atau 50.66 %. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan tahun 2005, maka perkembangannya menjadi 2,98 trilyun atau 224.07%. Sementara itu, untuk PDRB (2000) mengalami rata-rata perkembangan selama 5 tahun terakhir sebesar 177,76 milyar rupiah atau 15.10 %, di mana pada tahun 2009 dicapai PDRB sebesar 2,60 triliun rupiah lebih dan pada tahun 2005 hanya sebesar 1,71 triliun rupiah. Dibanding tahun 2005, maka perkembangannya pada tahun 2009 menjadi 888,81 miliar rupiah lebih (75.50 %).

Proporsi jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk pada tahun 2009, mengalami penurunan yang relatif kecil dibandingkan dengan tahun 2006, yakni dari angka persentase sebanyak 49.78% menjadi 49.38%. Sementara itu, persentase pengangguran terbuka pada tahun 2009, menurun menjadi 18.10 % daripada tahun 2006 sebanyak 18.97 %, lebih rendah daripada angka pengangguran di tingkat Provinsi Papua yang mencapai 20.92 % hingga Agustus 2009 (Sakernas, 2009). Sementara itu, struktur tenaga kerja di Kota Jayapura didominasi oleh sektor jasa. Selain berdasarkan PDRB struktur ekonomi dapat juga diamati berdasarkan tenaga kerja, dimana pencari kerja yang ditempatkan secara sektoral pada tahun 2009 memberi kontribusi terhadap total tenaga kerja sebesar 56,38%, diikuti sektor pertanian sebesar 21,36%, sektor industri sebesar 13,05%, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,21%.

Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja di Kota Jayapura mencapai 48,26% yang terdiri dari angkatan kerja yang sudah bekerja sebesar 40.38% dan angkatan kerja yang tidak bekerja sebesar 7.88 %. Sedangkan penduduk yang bukan

angkatan kerja, terdapat sekitar 51.74 %, yang terdiri dari penduduk yang sedang bersekolah sebanyak 18.49%, mengurus rumah tangga sebesar 21.29 %, dan lainnya sebesar 11.96 %. Rasio penduduk bekerja terhadap penduduk yang tidak bekerja semakin dapat ditingkatkan, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan status sosial masyarakat. Dengan proporsi jumlah penduduk yang bekerja 49.38 %, dan TPAK sebesar 57.26, berarti bahwa masih terdapat sekitar 9% dari jumlah penduduk usia kerja (15-46 tahun) yang tidak bekerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasar kerja didominasi oleh penduduk yang terdidik. Hal ini menunjukkan adanya relevansi terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah di Kota Jayapura. Akan tetapi, di sisi lain belum berhasil menampung tenaga kerja terdidik tersebut dalam lapangan kerja formal dan non-formal.

Data BPS tersebut menunjukkan fragmentasi pekerjaan yang beragam sangat menentukan pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura. Kuantifikasi mengenai pertumbuhan ekonomi tersebut pada prinsipnya menyisakan sejumlah persoalan mendasar di tingkat masyarakat lokal, khususnya menyangkut etos kerja masyarakat Papua di Kota Jayapura. Persoalan pokok dalam distribusi pekerjaan adalah mengenai pemberian peluang kepada masyarakat local untuk bekerja di sector-sector strategis, khususnya di bidang perdagangan. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat lokal atau orang Papua lebih cenderung meminati pekerjaan di bidang birokrasi (PNS) ketimbang di bidang perdagangan dan industri. Kedua sector ini kebanyakan digarap oleh masyarakat pendatang. Hal ini disebabkan oleh tingkat etos kerja masyarakat pendatang yang sangat tinggi sehingga memungkinkan mereka menguasai kedua sektor ini.

Kota Jayapura sangat potensial sebagai kota perdagangan karena didukung oleh infrastruktur yang baik. Keberadaan pelabuhan laut menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung upaya perdagangan Jayapura dan Papua. Pelabuhan sangat berperan untuk distribusi barang ke berbagai daerah di Papua. Kota Jayapura menjadi pusat Pendidikan, pariwisata, dan jasa (Kambu, 2009). Hal ini semakin mendukung kemajuan Jayapura karena menjadi pusat perekonomian, selain pusat pemerintahan. Dengan kondisi demikian, tentu saja juga berpengaruh terhadap lahirnya pola hubungan di masyarakat yang juga sangat heterogen dari segi etnis, bahasa, asal daerah, dan agama.

4.4 Hubungan Sosial Keagamaan

Papua yang memiliki slogan Tanah Damai memiliki konsekuensi logis dalam mewujudkannya di tengah berbagai potensi konflik, khususnya konflik antar agama semakin mengental beberapa tahun terakhir. Komposisi penduduk berdasarkan agama yang relatif seimbang antara Muslim dan Protestan tidak hanya berdampak pada kemungkinan lahirnya ketegangan hubungan di antara keduanya. Akan tetapi, kondisi tersebut juga berpeluang untuk menjauhkan Papua dari slogannya tadi sebagai tanah yang damai dan dapat dihuni oleh berbagai kelompok, termasuk kelompok agama (pemeluk). Dalam beberapa literatur, seperti yang telah diuraikan di bagian awal bab ini dapat dilihat adanya pola hubungan yang selalu berulang di Papua. Dalam hal ini, Papua tidak bisa dilepaskan begitu saja dari dinamika konflik antara pendatang (Muslim) dengan orang-orang Papua (asli).

Kehidupan umat beragama di Kota Jayapura menunjukkan derajat kualitasnya yang semakin baik guna

mendukung terciptanya tanah damai. Seerimbangan perti diketahui bahwa dilihat dari anutan agama masing-masing, maka umat beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing mengalami penambahan dari tahun ke tahun yang menggembirakan. Pertambahan tersebut bergerak simetris dengan pertumbuhan penduduk, baik karena pengaruh migrasi maupun kelahiran. Tampak bahwa hingga tahun 2008, terjadi peningkatan jumlah penganut agama dengan persentase pertambahan tertinggi (75.75% penganut agama Budha). Akan tetapi, jika dilihat dari angka nominal, maka pertambahan tertinggi adalah penganut agama Protestan. Peningkatan tersebut diikuti oleh bertambahnya sarana peribadatan dengan persentase tertinggi pada gereja Protestan, disertai dengan semakin banyaknya rohaniawan yang dibina.

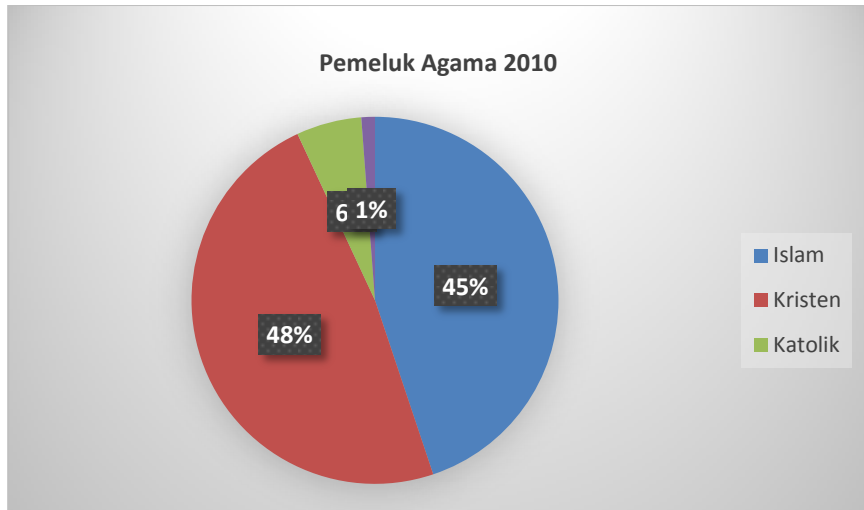
Secara kualitatif analisis tentang kualitas kehidupan beragama dalam menciptakan Kota Jayapura sebagai Tanah Damai dan meningkatkan kerukunan hidup beragama dapat dibuktikan secara konkrit. Berbagai kegiatan yang dilakukan telah menyentuh kebutuhan masyarakat penganut agama masing-masing. Pembinaan, prasarana dan sarana gedung Gereja, Masjid, Kuil, Vihara serta kelengkapan sarana pendukung keagamaan, kegiatan keagamaan, dan kehidupan keagamaan berjalan secara baik selama lima tahun terakhir ini. Peran pembinaan keagamaan terhadap pemeluk agama dilakukan oleh pemerintah melalui Kemeterian Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, institusi gereja dan Islam khususnya secara terstruktur juga melakukan pembinaan-pembinaan di internal umat mereka, demikian pula yang dilakukan oleh institusi agama-agama seperti Hindu dan Budha.

Migrasi membentuk masyarakat Papua yang multiras, multi suku-bangsa, multietnik, multi kedaerahan, multi

keagamaan, multiafiliasi, dan loyalitas politik. Hanya saja, perubahan komposisi penduduk membuat orang asli menjadi kurang nyaman karena belum terlalu terbiasa berada di lingkungan sosial di mana begitu banyak suku-bangsa di sekitar kehidupannya. Bagi masyarakat kota mungkin terbiasa dengan kondisi demikian, tetapi orang kampung belum terbiasa. Kalau dahulu hanya beberapa masjid, kini di mana-mana ada masjid dan orang berjilbab sangat banyak. Penganut agama Budha (Vihara) dan agama Hindu (Pura) juga terus berkembang pula. Petani bukan saja orang asli, tetapi suku-bangsa lain pun ada bahkan lebih mampu berladang di wilayah adatnya. Dalam masyarakat asli terdapat ± 250 suku-bangsa, bahasa (lokal), adat istiadat, dan wilayah adat. Orang asli terbagi pula dalam ribuan marga (*clan*), serta stratifikasi sosial dan status sosial sehingga sesungguhnya di antara orang asli sendiri terpisah-pisah dan tidak saling mengenal.

Menurut data dari kantor Kemenag Kota Jayapura pada tahun 2009, penganut agama yang berada di wilayah ini terdiri dari Kristen 113.314 jiwa, Katolik 43.248 jiwa, Islam 94.953 jiwa, Hindu 2.495 jiwa, Budha 1.927 jiwa. Dari komposisi penduduk menurut penganut agama, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Jayapura mayoritas adalah penganut agama Kristen. Berdasarkan data tahun 2010, dalam konteks Jayapura, pemeluk Islam menduduki posisi terbesar kedua dengan jumlah 70.072 jiwa atau 45,05 % dari total penduduk yang berjumlah 155.548 jiwa. Posisi pertama masih diduduki pemeluk Kristen dengan jumlah 75.288 jiwa atau 48,40 %. Posisi ketiga adalah pemeluk Katolik sebesar 8.968 jiwa atau 5,77 %. Pemeluk Islam (Muslim) didominasi oleh pendatang dengan jumlah 121.837 jiwa dan penduduk Muslim asli sebanyak 4.958 jiwa. Sedangkan pemeluk Kristen dan Katolik dari penduduk asli

sebesar 149. 272 jiwa, pemeluk Kristen dan Katolik pendatang sebesar 62.996 jiwa (BPS, 2010, Indiyanto, 2010: 14-15). Secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Kondisi Pemeluk Agama Jayapura
Sumber: Data BPS diolah peneliti, 2016

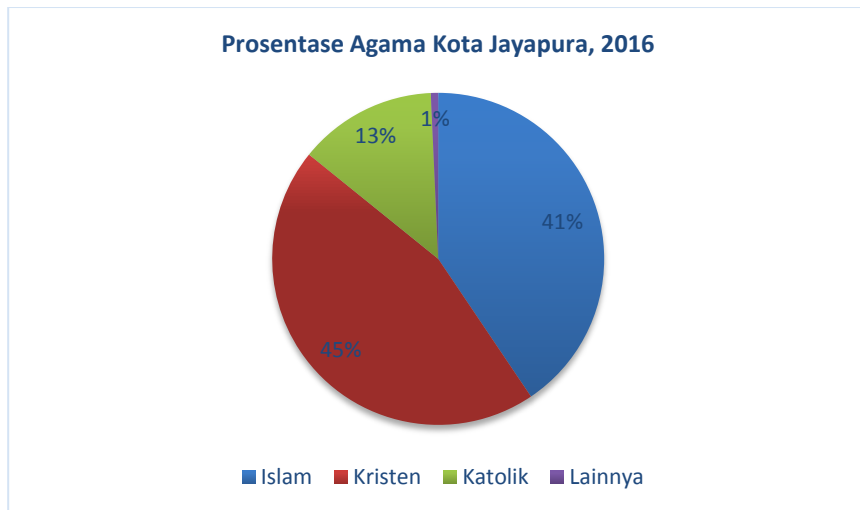
Adapun data terakhir yang diperoleh menunjukkan tren yang relatif sama, di mana pemeluk Protestan masih menduduki posisi teratas. Data tahun 2016 yang diperoleh peneliti masih menunjukkan kecenderungan yang sama, artinya pemeluk Protestan masih menjadi terbanyak di Kota Jayapura. Pada tahun 2016 sebagaimana yang dilansir oleh Kantor BPS Kota Jayapura menggambarkan bahwa pemeluk Protestan berjumlah 383.493 jiwa, Muslim kemudian berada pada urutan kedua sebanyak 254.100 jiwa, Katolik sebanyak 84.474 jiwa, Budha sebanyak 2.370 jiwa, dan Hindu sebanyak 2097 jiwa. Secara ringkas, kondisi pemeluk agama di Kota Jayapura pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Kondisi Penduduk Kota Jayapura Berdasarkan Agama pada tahun 2016

AGAMA					JUMLAH
Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
254.100	283.493	84.474	2.097	2.370	626.534

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2016 diolah oleh Peneliti.

Jumlah tersebut tersebar ke dalam 5 (lima) distrik atau kecamatan di wilayah Kota Jayapura, yaitu Abepura, Muara Tami, Heram, Jayapura Utara, dan Jayapura Selatan. Komposisi penduduk berdasarkan agama ini tidak lepas dari adanya migrasi besar-besaran dari luar Kota Jayapura sehingga munculnya anggapan adanya Islamisasi dan Kristenisasi di Kota Jayapura dalam beberapa konteks menjadi sangat kompleks. Secara prosentase, komposisi penduduk berdasarkan agama pada tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.3 Prosentase Agama Kota Jayapura tahun 2016
 Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2016 diolah oleh Peneliti

Dinamika kehidupan sosial keagamaan di Kota Jayapura mengalami pasang-surut khususnya pasca Reformasi. Kondisi ini terjadi akibat banyaknya perubahan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat Jayapura. Ketika Reformasi, keberanian penduduk baik asli maupun pendatang tampak terlihat dalam berbagai praktik kehidupan seperti semakin bangkitnya ekonomi pendatang dan semakin menguatnya tuntutan penduduk asli yang mulai terpinggirkan. Ketegangan pun tidak terhindarkan di mana kecurigaan yang sebelumnya mulai memudar muncul kembali dalam benak penduduk asli mengenai penguasaan penduduk pendatang. Kecurigaan adanya ekspansi dan penguasaan penduduk pendatang semakin menguat di kalangan mereka, bahkan sampai pada klaim menguatnya kembali Islamisasi melalui sektor publik seperti penguasaan sentra-sentra ekonomi dan pendidikan (Qodir, 2015: 44).

Upaya mengatasi kerawanan sosial yang kemudian dapat mengarah kepada konflik bernuansa agama kemudian dilakukan

oleh pemerintah kota Jayapura melalui beberapa momen kegiatan yang mempertemukan beberapa agama di Kota Jayapura. Salah satu implementasi dari amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 & 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Pemerintah Kota Jayapura telah membentuk dan mengukuhkan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama periode 2007-2012. Untuk periode kedua Walikota Jayapura telah menerbitkan Keputusan Walikota Jayapura Nomor: 31 Tahun 2012 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura Periode 2012-2016.

Berbagai upaya ditempuh dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memelihara dan meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Jayapura yang sampai saat ini sangat kondusif, tidak pernah terjadi konflik antar maupun intern umat beragama yang dapat menimbulkan renggangnya hubungan antar warga. Jika pun ada isu-isu yang menyangkut soal agama baik yang diakibatkan oleh pemberitaan dari luar maupun yang muncul di dalam, maka segera dapat diredam dengan melibatkan semua unsur instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat itu sendiri. Berbagai contoh misalnya untuk menunjukkan bahwa kerukunan antar umat memang benar terjadi di Kota Jayapura adalah ditunjukkan ketika perayaan hari-hari besar keagamaan, jika pada waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Adha, waktu shalat para pemuda dari pihak Kristen ikut menjaga jalannya

shalat begitu pula sebaliknya ketika Hari Natal juga pemuda muslim berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Walikota dan Wakil Walikota aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan hadir dalam upacara-upacara keagamaan, Walikota ikut dalam kebaktian-kebaktian yang dilakukan oleh berbagai pihak gereja yang ada di Kota Jayapura begitu pula halnya Wakil Walikota bersama shalat tarawih keliling selama bulan Ramadan. Artinya, kedua elite pemimpin tersebut menjalankan aktivitas keagamaannya sesuai dengan agama yang dianut. Meskipun demikian, ada banyak aktivitas yang melibatkan keduanya yang terkait dengan aktivitas keagamaan.

Ada kegiatan bersama yang sudah ditetapkan untuk selalu diperingati yaitu pada tanggal 5 Pebruari setiap tahun, yaitu perayaan masuknya pertama kali Injil ke tanah Papua yang selanjutnya telah menjadi kesepakatan bersama para pemuka agama pada tanggal 5 Pebruari juga ditetapkan menjadi, Hari Damai di Tanah Papua. Berbagai kegiatan dilakukan dari seminar, pameran dan petunjukan budaya dari masing-masing etnis yang ada di Papua. Kegiatan ini atas biaya bersama baik Provinsi maupun Kota Jayapura yang juga melibatkan FKUB Provinsi maupun FKUB Kota Jayapura. Selain itu, seluruh lembaga keagamaan dilibatkan dalam kegiatan penanggulangan HIV AIDS yang diselenggarakan oleh Komite Penanggulangan HIV AIDS dengan biaya yang disediakan oleh APBD Kota Jayapura.

Berkenaan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas-tugas FKUB diakui oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas memang belum maksimal sebagai contoh sampai saat ini sarana dan prasarana untuk FKUB belum ada, Kantor misalnya masih bersama dengan FKUB Provinsi

yang menempati gedung eks Kementerian Agama Kota Jayapura yang sebelumnya Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, dukungan dana yang khusus diperuntukkan untuk FKUB juga belum memadai yang ada baru dana dukungan yang disediakan oleh Dinas Sosial sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta) untuk tahun 2012, ada juga dana yang dikeluarkan oleh pihak Sekretariat dalam mendukung pelaksanaan perayaan hari damai di tanah Papua pada setiap tanggal 5 Pebruari dan juga ada dana yang diperuntukkan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama yang melibatkan FKUB sebagai Nara Sumber, yang keberadaan dana tersebut melekat pada DIPA Kesbangpol dan Linmas Kota Jayapura. Adapun besarnya sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus Juta) untuk tahun 2012 dan direncanakan meningkat menjadi 150 Juta pada tahun anggaran 2013 mendatang. Untuk menyusun kegiatannya pihak Kesbangpol dan Linmas mengundang pengurus FKUB untuk membicarakan alokasi dana tersebut untuk dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh pengurus FKUB itu sendiri.

Berkenaan dengan peran Dewan Penasehat FKUB yang Ketuanya exs offisio Wakil Walikota, Sekretarisnya Kepala Kesbangpol dan Linmas sedangkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat FKUB, secara khusus rapat yang membicarakan tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama belum pernah dilakukan, namun demikian pertemuan-pertemuan yang melibatkan unsur-unsur Dewan Penasehat FKUB sering dilakukan seperti pada acara copy morning yang rutin dilakukan oleh Wakil Walikota di Kantor Walikota Jayapura walaupun tidak secara spesifik berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan

umat beragama tetapi menyangkut kondisi dan situasi kota Jayapura termasuk kehidupan beragama di dalamnya.

Selain inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di Kota Jayapura, beberapa elemen masyarakat dan pribadi memiliki peran yang cukup signifikan di dalam memelihara hubungan-hubungan sosial-keagamaan di Kota Jayapura. Hal ini terlihat misalnya upaya yang dilakukan oleh seorang tokoh Muslim pendatang keturunan Yaman, Thaha Muhammad al-Hamid mampu bersanding bahu-membahu berjuang demi perdamaian dan kemerdekaan Papua. Hasil utama lainnya adalah mulai tumbuhnya teologi pembebasan Islam yang kini diusung oleh generasi Muslim Papua. Ismail Asso, yang kini berjalan seiring dengan teologi pembebasan sebagaimana yang diusung oleh gereja-gereja Papua semenjak 1995 (Qodir, 2015: 45).

Kemajemukan agama dan etnik di kota Jayapura sejatinya merupakan modal yang sangat memadai untuk kemajuan kota Jayapura. Hubungan-hubungan sosial-keagamaan yang selama ini tercipta di Kota Jayapura merupakan sebuah kesadaran ke-papua-an yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama dan etnik. Ini berarti, bahwa masyarakat di Kota Jayapura, terlepas dari persoalan etnik dan agama, merasa memiliki kota Jayapura, menetap dan bekerja di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, temuan penelitian Qodir (2015) menunjukkan, bahwa dalam hal kehidupan sosial menunjukkan bahwa keduanya (agama dan politik) dalam praktik kehidupan sosial masyarakat menyatu. Agama menjadi sangat sakral, tetapi pada saat yang bersamaan sangat mudah dijual. Budaya masyarakat permisif memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil berbagai bentuk budaya yang datang dari luar. Penerimaan masyarakat yang tinggi berakibat munculnya budaya

baru, meniru segala sesuatu yang cocok kemudian mengakui sebagai miliknya.

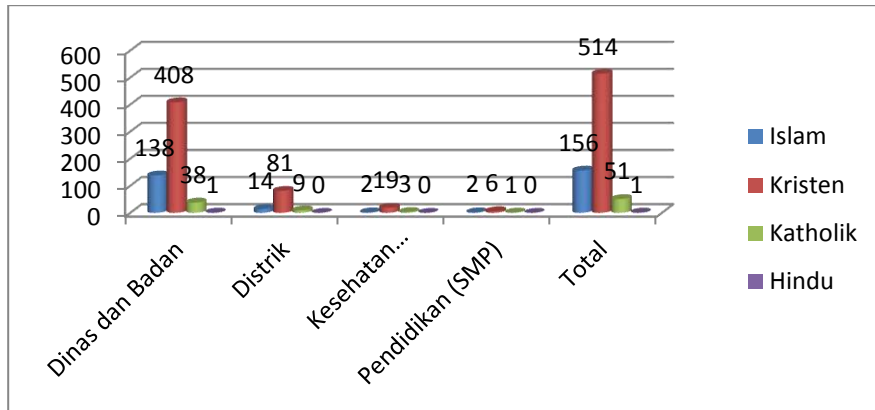
Uraian-uraian di atas memberikan penjelasan atas hubungan Muslim dan Kristen di Jayapura mewujudkan dalam beberapa bentuk. Salah satu bentuk hubungan yang terjadi adalah makin mengentalnya ikatan-ikatan primordial seperti etnis dan agama. Akan tetapi, persoalan yang lebih mewarnai hubungan tersebut adalah hubungan etnis yang mendasari pola-pola hubungan yang berlangsung. Ikatan etnis, khususnya di kalangan Kristen (orang Papua) sangat dominan. Sebab, etnis menjadi faktor penting termasuk dalam penentuan posisi atau jabatan strategis di lingkungan birokrasi pemerintahan Kota Jayapura.

4.5 Kondisi Pegawai Pemerintah Kota Jayapura

Jumlah pegawai di lingkungan Kota Jayapura dapat dilihat berdasarkan agama dan jabatan pada masing-masing bagian di lingkungan pemerintahan. Berikut ini ditampilkan beberapa data yang menunjukkan kondisi pegawai berdasarkan dinas/badan/bagian/satuan, sampai tingkat kecamatan serta pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan Pendidikan (kepala sekolah).

Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura sebanyak 721 orang yang terbagi ke dalam beberapa dinaa, badan, bagian, satuan, dan lain-lain. Berdasarkan golongan eselon, mereka terbagi menjadi eselon II b sampai IV b yang mencakup kepala hingga pelaksana. Berikut ini, peneliti memaparkan rincian pegawai berdasarkan agama dan eselon masing-masing sebagaimana fokus kajian disertasi ini.

Diagram 4.5.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Bagian



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Daigram 4.5.1 di atas memberikan gambaran mengenai komposisi pegawai/pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang terbagi ke dalam beberapa dinas, badan, satuan, puskesmas, dan pendidikan. Secara ringkas, mengenai tabel di atas dapat dilihat berdasarkan uraian tabel berikut.

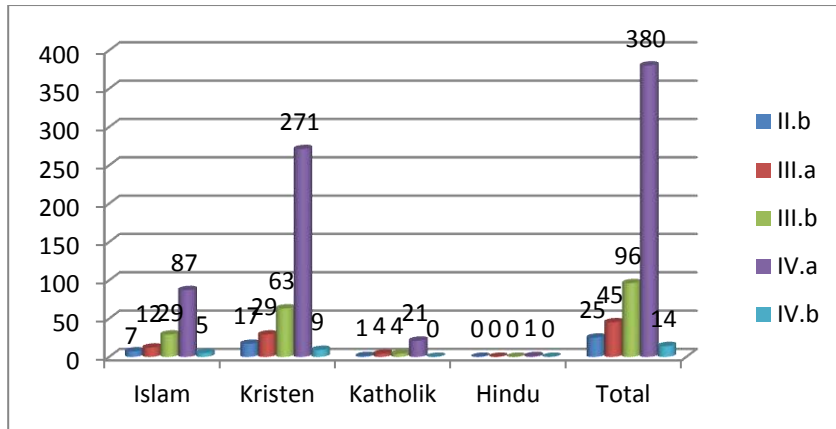
Tabel 4.5.1 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Agama

	Islam	Kristen	Katholik	Hindu
Dinas dan Badan	138	408	38	1
Distrik	14	81	9	0
Kesehatan (Puskesmas)	2	19	3	0
Pendidikan (SMP)	2	6	1	0
Total	156	514	51	1

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Distribusi pegawai/pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan agama dan eselon diuraikan sebagaimana diagram berikut.

Diagram 4.5.2 Pegawai Berdasarkan Agama dan Eselon



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Secara ringkas, diagram di atas menunjukkan kecenderungan distribusi pegawai/pejabat berdasarkan agama dan eselon. Tabel 4.5.2 memberikan uraian yang menunjukkan kecenderungan diagram di atas.

Tabel 4.5.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Agama dan Eselon

	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
Islam	7	12	29	87	5
Kristen	17	29	63	271	9
Katholik	1	4	4	21	0
Hindu	0	0	0	1	0
Total	25	45	96	380	14

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Jika diurai berdasarkan suku, maka distribusi pegawai/pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dapat dilihat pada gambar berikut. Perbandingan antar suku dapat dilihat dengan jelas pada tabel 4.5.1.



Gambar 4.5.1 Komposisi Pegawai/Pejabat Berdasarkan Suku
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Demikian secara sekilas digambarkan mengenai komposisi pegawai/pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Jayapura Papua mulai dari agama, etnis, dan juga eselon.